



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**INSPEKTORAT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

---

**I. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan .
- b) Asumsi kesinambungan entitas, berate bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c) Asumsi ketrukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

**1.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui saat kas dikeluarkan.

- a) Basis Akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa :
  1. Pendapatan – LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima

2. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah/ kas SKPD
- b) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
- 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
  - 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

### **1.3 Basis Pengukuran**

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

### **1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, antara lain :

#### **A. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

## **1. Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

## **2. Akuntansi Belanja ( LRA )**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

**a) Belanja Operasi**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

**b) Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

**c) Belanja Lainlain/Tak Terduga**

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

**3. Akuntansi Surplus Defisit**

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit - LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

**B. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Masing- masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan

dan dana bagi hasil.

- d. Akun Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.

### **1. Akuntansi Pendapatan-LO**

Definisi Pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

#### **a. Klasifikasi Pendapatan**

Klasifikasi pendapatan menurut PP no 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer. Lainnya Pendapatan Daerah yang sah

#### **b. Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan yaitu; Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Bukan Pajak –LO, Pendapatan Hibah-LO, Pendapatan Lainnya. Pendapatan-LO diakui saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan

Pendapatan-LO yang diakui saat timbulnya hak adalah:

- Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

- b) Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi)

Untuk mengakui Pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan

## 2. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

### a. Klasifikasi Beban

#### 1) Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

#### 2) Beban Transfer

Beban Transfer terdiri dari Beban Bagi Hasil Pajak, Beban bagi Hasil Pendapatan lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan ke Desa, Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya

#### 3) Beban Non Operasional

Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari:

- Defisit penjualan aset non lancar
- Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang
- Defisit dari kegiatan non operasional lainnya

#### 4) Beban Luar Biasa

Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa.

Yang termasuk kejadian luar biasa adalah:

- Tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran
- Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- Kejadiannya diluar kendali pemerintah

Beban diakui saat :

- ✓ Timbulnya kewajiban

Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah

- ✓ Terjadinya konsumsi aset

Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah

- ✓ Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

- ✓ Koreksi atas Beban (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan.

### **3. Akuntansi Surplus Defisit – LO**

Surplus –LO adalah selisih lebih antara pendapatan- LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Defisit - LO adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

## **C. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **D. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

### **1) Aset**

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi

manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

**a) Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- (1) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.
- (2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.
- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.



- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

**b) Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen

**(1) Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas

investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

## **(2) Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat.

Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

## **c) Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

**(1) Tanah**

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

**(2) Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

**(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan**

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

**(4) Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

**(5) Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya

perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

#### **(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasi sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran keim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **d) Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

##### **(1) Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

## **(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. Aset ini merupakan kewenangan PPKD bukan SKPD, sehingga dalam laporan keuangan SKPD Inspektorat Kab. Loteng tidak terdapat Tagihan Jangka Panjang/ tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Namun data ini muncul di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **(3) Aset Tak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

## **(4) Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

## **2) Kewajiban**

adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas

pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

**(2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

**(3) Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPh)**

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPh yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

**(4) Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut

**b) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

### 3) Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah.

## II. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### 2.1 Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 28.784.586,34,- yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian uang dan Barang, Denda Keterlamabatan, Pendapatan dari Pengembalian dan Penerimaan lain-Lain.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah			
2	Pendapatan Retribusi			
3	Lain-lain PAD yang Sah		28.784.586,34	
<b>Jumlah</b>			<b>28.784.586,34</b>	

Rincian Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian*	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan	-	-	-
2.	Pendapatan Jasa Giro	-		-
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		26.724.683,34	
4.	Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan		2.059.903,00	
5.	Pendapatan dari Pengembalian			
4.	Penerimaan Lain-Lain	-		-
<b>TOTAL</b>			<b>28.784.586,34</b>	

## 2.2 Belanja - LRA

Dari Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2021 yang telah mengalami Recofusing sebesar Rp. 12.787.035.257,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 12.656.594.248,- atau 98,98 %, Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	12.354.641.107,-	12.231.148.248,-	99,00%
2.	Belanja Modal	432.394.150,-	425.446.000,-	98,39%
<b>Jumlah</b>		<b>12.787.035.257,-</b>	<b>12.656.594.248,-</b>	<b>98,98%</b>

### a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 12.231.148.248,- atau 99,00 % dari anggaran sebesar Rp. 12.354.641.107,- Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	8.986.425.012, -	8.965.927.351, -	99,77%
2.	Belanja Barang dan Jasa : 1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 2) Barang jasa selain hibah	3.368.216.095,-	3.265.220.897,-	96,94%
<b>J u m l a h</b>		<b>12.354.641.107,-</b>	<b>12.231.148.248,-</b>	<b>99,00%</b>



Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp 8.965.927.351,- dari anggaran sebesar Rp.

8.986.425.012,- atau 99,77 % dari target Belanja pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

No.		Anggaran	Realisasi	%
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>			
1	Belanja Gaji Pokok PNS/ UangRepresentasi	3.867.197.401,00	3.903.724.660,00	100,94
2	Belanja Tunjangan Keluarga	384.392.973,00	389.039.403,00	101,21
3	Belanja Tunjangan Jabatan	92.224.800,00	98.055.000,00	106,32
4	Belanja Tunjangan Fungsional	602.726.000,00	610.485.000,00	101,29
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	26.840.800,00	26.910.000,00	100,26
6	Belanja Tunjangan Beras	226.382.023,00	228.340.260,00	100,87
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.745.633,00	22.066.790,00	101,48
8	Belanja Pembulatan Gaji	58.491,00	58.441,00	99,91
9	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.755.154.891,00	3.677.545.797,00	97,93
10	Belanja Honorarium	9.702.000,00	9.702.000,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.986.425.012,00</b>	<b>8.965.927.351,00</b>	<b>99,77</b>

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 3.368.216.095,00- dan terealisasi sebesar Rp. 3.265.220.897,00,- atau 96,94 % sampai dengan Bulan Desember 2021 dirinci sebagai berikut:

<b>BELANJA BARANG JASA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Belanja Bahan Habis Pakai	721.508.095,00	718.316.000,00	99,56%
Belanja Jasa Kantor	288.220.000,00	261.775.976,00	90,83%
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.500.000,00	45.500.000,00	100,00%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas	2.110.068.000,00	2.091.460.921,00	99,12%
Belanja kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Tekhnis PNS	196.920.000,00	142.168.000,00	72,20%
<b>JUMLAH</b>	<b>3.368.216.095,00</b>	<b>3.265.220.897,00</b>	<b>96,94%</b>

### b.) Belanja Modal

Anggaran untuk belanja modal tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 432.394.150,00- dan realisasi sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 425.446.000. Berikut rinciannya:

<b>No.</b>	<b>Jenis Belanja*</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1	Belanja Tanah	-	-	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	432.394.150,00	425.446.000,00-	98,39%
3	Belanja Gedung dan Bangunan			
<b>Jumlah</b>		<b>432.394.150,00-</b>	<b>425.446.000,00-</b>	<b>98,39%</b>

Realisasi belanja modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Kantor	56.150.000,00	56.050.000,00	99,82
2	Belanja Modal Rumah Tangga	259.994.150,00	259.698.000,00	99,89
3	Belanja Modal Alat Studio,	13.550.000,00	13.500.000,00	99,63
4	Belanja Modal Komputer	30.000.000,00	28.850.000,00	96,17
5	Belanja Modal Peralatan Komputer	72.700.000,00	67.348.000,00	92,64
Jumlah		432.394.150,00	425.446.000,00	98,39

### 2.3 Surplus/Defisit LRA

Dari anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka terjadi Defisit anggaran adalah sebesar Rp. (12.627.809.661,66)

## III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan LO pada Inspektorat Kab. Loteng, sebesar Rp. 28.784.586,34 yang terdiri dari pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran Barang/Jasa.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah			
2	Pendapatan Retribusi			
3	Lain-lain PAD yang Sah		28.784.586,34	
<b>Jumlah</b>			28.784.586,34	

### 3.2 Beban- LO

#### a. Beban Operasi

Beban operasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. **12.546.690.307,00**

Beban Operasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Beban Operasi	Realisasi
1	Beban Pegawai	8.961.421.161,00,-
2	Beban Persediaan	717.934.000,00
3	Beban Jasa	453.443.576,00
4	Beban Perjalanan Dinas	2.091.460.921,00
5	Beban Penyusutan	322.430.649,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>12.546.690.307,00</b>

#### 1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Realisasi Belanja Pegawai di tambah dengan Beban Gaji Pegawai yang belum dibayar sampai dengan bulan Desember 2021, dikurangi hutang beban Pegawai 2020 yang sudah terbayar di tahun 2021 Berikut perhitungannya :

- Realisasi Belanja Pegawai .....Rp. 5.278.679.554,00,-
- Kekurangan Gaji Pegawai yang belum di bayar :
  - Gaji Pokok Rp. 4.006.000,00
  - Tunjangan Keluarga Rp. 79.176,00
  - Tunjangan Fungsional Rp. 515.000,00
  - Pembulatan Rp. 1.940,00
- Jumlah Kekurangan Gaji : Rp. 4.602.116,00
- Hutang Beban Pegawai 2020 yang telah di bayar:
  - Gaji Pokok PNS Rp. 7.142.940,00-
  - Tunjangan Keluarga Rp. 811.444,00
  - Tunjangan Fungsional Rp. 350.000,00,-
  - Tunjangan Fung. Umum Rp. 370.000,00,-
  - Tunjangan Beras Rp. 434.520,00,-
  - Pembulatan Rp ( 598,-)
- Jumlah Rp. (9.108.306,00,-)

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan	Rp. 5.274.173.364,00,-
- Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 3.677.545.797,00,-
- <u>Honorarium Pengelola Keuangan</u>	<u>Rp. 9.702.000,00,-</u>
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>Rp. 8.961.421.161,00,-</b>

## 2. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan akumulasi dari Belanja Barang, dihitung dengan memperhatikan saldo persediaan Tahun Lalu dan Tahun Berjalan. Perhitungannya sebagai berikut:

Beban Bahan Habis Pakai :

• Realisasi Belanja Barang/Pakai Habis .....	Rp. 718.316.000,00
• Saldo Persediaan Per 31 Des 2020.....	Rp. 275.000,00,-
• <u>Saldo Persediaan Per 31 Des 2021.....</u>	<u>(Rp. 657.000,00,-)</u>
- Jumlah Beban Habis Pakai.....	Rp. 717.934.000,00,-
- Beban Bahan/Material.....	.. Rp. 0,00,-
- Beban Cetak.....	<u>Rp. 0,00,-</u>
<b>Jumlah Beban Persediaan.....</b>	<b>Rp 717.934.000,00,-</b>

## 3. Beban Jasa

Beban Jasa terdiri dari Beban, Beban Jasa Kantor, Perawatan Kendaraan Bermotor, Beban Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek. Beban Jasa Kantor dihitung dengan menjumlahkan realisasi belanja jasa kantor dikurangi beban tagihan listrik air dan telepon tahun 2020 yang dibayar tahun 2021.

**Beban Jasa Kantor:**

• Realisasi Belanja Jasa Kantor	Rp. 261.775.976,00,-
• Rek Internet Desember 2020.....	(Rp. 2.000.400,00,-)
- Jumlah Beban Jasa Kantor.....	Rp. 259.775.576,00,-
- Beban Perawatan Kendaraan Bermotor.....	Rp. 45.500.000,00,-
- Sewa Sarana Mobilitas.....	Rp. 6.000.000,00,-
- Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek.....	<u>Rp. 142.168.000,00,-</u>
<b>Jumlah Beban Jasa.....</b>	<b>Rp. 453.443.576,00,-</b>

#### 4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan Realisasi atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ditambah dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah berikut perhitungannya :

- Perjalanan Dinas Biasa .....	Rp	62.390.921,00
- <u>Perjalanan Dinas Dalam Kota.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>2.029.070.000,00</u>
- <b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.091.460.921,00,-</b>

#### 5. Beban Penyusutan

No	Aset Tetap	Penyusutan Semester I	Penyusutan Semester II	Jumlah Penyusutan
1	Tanah			
2.	Peralatan dan Mesin			322.430.649,00
3.	Gedung dan Bangunan			
4.	Jalan Irigasi Jaringan			
5.	Aset Tetap Lainnya			
Jumlah				

#### 3.3 Defisit Non Operasional

Tidak terdapat Saldo Defisit Non Operasional pada Inspektorat Kab. Lombok Tengah

#### 3.4 Surplus/Defisit LO

Dari realisasi pendapatan, Beban serta Defisit dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka terjadi Defisit LO adalah sebesar (Rp.12.517.905.720,66)

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Saldo Ekuitas per Desember 2021 adalah sebesar Rp. 943.091.261,40,-. Nilai tersebut diperoleh dengan mengakumulasikan ekuitas awal 2020 dikurangi dengan surplus defisit LO ditambah dengan RK/PPKD, maka diperoleh Ekuitas Per Juni 2021. Berikut perhitungannya :

URAIAN	2021
EKUITAS AWAL	833.187.320,40
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12.517.905.720,66)

<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>	
Koreksi Piutang	
- piutang TGR	
- piutang Pendapatan	
Koreksi Beban	
Koreksi Penyisihan Piutang	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi Nilai Aset Tetap	
- Penyusutan	
- tidak ada sejak tahun lalu	
- ke catatan extracomptable	
Koreksi Nilai Aset Non APBD	
Koreksi Nilai Aset Lainnya	
Koreksi Utang	
- Utang asuransi	
- Utang Beban	
- Utang Barang dan Jasa	
R/K PPKD	12.627.809.661,66
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>943.091.261,40</b>

## V. NERACA

### 1. ASET

#### a) Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2021 terdiri dari:

##### 1) Kas di Bendahara Pengeluaran\*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp **0,00-**.  
dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo
1.	Sisa Kas	0,00,-
2.	Pajak Pusat yang belum disetor ke Kas Negara	
3.	Sisa Pengelolaan Askes/Jamkesmas	
<b>Jumlah</b>		<b>51.930.693,00,-</b>

##### 2) Persediaan

Persediaan merupakan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 657.000,00,- dan Rp. 275.000,00,- Nilai persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan*	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp.)	Saldo Per Desember 2020 (Rp.)
1.	Persediaan ATK, dll	657.000,	275.000,-
2.	Persediaan Bahan Komputer	0	
3.	Persediaan Perabot Kantor		
4.	Persediaan Alat Listrik	0	
<b>Jumlah</b>		<b>657.000,-</b>	<b>275.000,-</b>

#### b) Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2021 dan saldo per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp **947.036.377,40,-** dan Rp. **844.021.026,40,-** Nilai Aset Tetap merupakan jumlah



aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Inspektorat yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo per	
		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Tanah	0.00	0.00
2	Peralatan dan Mesin	3.366.090.619,75	2.940.644.619,75
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	940.000,00	940.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-
7	Akumulasi Penyusutan	(2.419.994.242,35)	(2.097.563.593,35)
	<b>Jumlah</b>	<b>947.036.377,40,-</b>	<b>844.021.026,40,-</b>

Jumlah aset tetap sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terjadi Perubahan disebabkan adanya penambahan nilai Aset.

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Aset	Saldo per Desember 2020	Penambahan	Pengurangan		Saldo per Juni 2021
			Mutasi	Penghapusan	
Tanah	0.00				0.00
Peralatan dan Mesin	2.940.644.619,75	425.446.000,00			3.366.090.619,75
Gedung & Bangunan	0.00				0.00
Jalan, Irigasi dan Jembatan	0.00				0.00
Aset Tetap Lainnya	940.000.00				940.000.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-				-
<b>Jumlah ASET TETAP</b>	<b>2.941.584.619,75</b>	<b>425.446.000,00</b>			<b>3.367.030.619,75</b>

### c.) Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,00-

## 5.2. KEWAJIBAN

### 1) Utang Beban

Saldo utang beban terdiri dari beban Belanja pegawai yang belum dibayar sampai dengan Bulan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.389.902,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- Kekurangan Gaji Pegawai yang belum di bayar :

Gaji Pokok	Rp. 4.006.000,00
Tunjangan Keluarga	Rp. 79.176,00
Tunjangan Fungsional	Rp. 515.000,00
<u>Pembulatan</u>	<u>Rp. 1.940,00</u>

- Jumlah Kekurangan Gaji : Rp. 4.602.116,00

No.	Uraian	Saldo Per Desember 2021 (Rp)	Saldo Per Desember 2020 (Rp)
1.	Utang Beban	4.602.116,00	11.108,706,00,-
<b>TOTAL</b>		<b>4.602.116,00</b>	<b>11.108,706,00,-</b>

## 5.3. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 942.091.261,40**. Ekuitas dapat diperoleh dengan Mengurangi Jumlah Aset dengan Utang /Kewajiban.

Praya, 31 Desember 2021  
Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Inspektur  


Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd.

NIP. 19670521n199203 1 011

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

**Praya, 10 Januari 2022**

**Inspektorat Kab. Lombok Tengah**

**Inspektur**



**Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd.**

**NIP. 19670521n199203 1 011**

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**INSPEKTORAT**

Kantor Bupati Lombok Tengah Lt.4 Gedung Sholoh / C Jln Raden Puguh Praya

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN OPERASIONAL,  
NERACA, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN ANGGARAN**

**2021**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
LAPORAN OPERASIONAL  
PER 31 Desember 2021

URAIAN	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>		-
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		
Pendapatan Pajak Daerah		
Pendapatan Retribusi Daerah		
Lain-lain PAD Yang Sah	28.784.586,34	17.463.449,69
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>28.784.586,34</b>	<b>17.463.449,69</b>
<b>BEBAN</b>		
Beban Pegawai	8.961.421.161,00	6.301.979.386,00
Beban Persediaan	717.934.000,00	278.172.550,00
Beban Jasa	453.443.576,00	758.419.189,00
Beban Pemeliharaan	-	-
Beban Perjalanan Dinas	2.091.460.921,00	1.576.539.713,00
Beban Hibah		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	322.430.649,00	273.351.507,96
Beban Penyisihan Piutang		
Beban Lain-lain		
<b>Jumlah Beban</b>	<b>12.546.690.307,00</b>	<b>9.188.462.345,96</b>
<b>SURPLUS/DESFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(12.517.905.720,66)</b>	<b>(9.170.998.896,27)</b>
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -		
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>		<b>11.226.500,00</b>
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	11.226.500,00
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN</b>	-	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	-	
<b>POS LUAR BIASA</b>		
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO		
BEBAN LUAR BIASA		
<b>JUMLAH POS LUAR BIASA</b>		
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(12.517.905.720,66)</b>	<b>(9.182.225.396,27)</b>

Praya, 31 Desember 2021  
Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Inspektur

**Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd**  
NIP. 19670521 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 Desember 2021

SKPD INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Uraian	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	833.187.320,40	3.430.346.290,99
2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	(12.517.905.720,66)	(9.182.225.396,27)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Nilai Kas		
5	Koreksi Nilai Piutang		
	Koreksi Penyisihan Piutang		
6	Koreksi Nilai Beban Dibayar Dimuka		
7	Koreksi Nilai Persediaan		
8	Koreksi Nilai Investasi		
9	Koreksi Nilai Aset Tetap	-	(4,63)
	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan		286.811.951,00
10	Koreksi Nilai Aset Lainnya	-	(1.500.000,00)
11	Koreksi Nilai Kewajiban		
12	Koreksi Nilai Aset Non APBD		
13	RK PPKD	12.627.809.661,66	6.299.754.479,31
14	EKUITAS AKHIR	943.091.261,40	833.187.320,40

Praya, 31 Desember 2021  
Inspektorat Kab. Lombok Tengah  
Inspektur

Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd  
NIP. 19670521 199203 1 011

10780830108





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**N E R A C A**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

SKPD      INSPEKTORAT DAERAH

No	URAIAN	2021	2020
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	<b>Kas dan Setara Kas</b>		
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
6	Kas di BLUD		
7	Setara Kas		
8	Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)		
9	Kas di Bendahara BOS		
10	<b>Piutang Pendapatan</b>		
11	Piutang Pajak Daerah		
12	Piutang Retribusi Daerah		
13	Piutang Lain-lain PAD		
14	Penyisihan Piutang Pendapatan		
15	<b>Piutang Lainnya</b>		
16	Piutang Lain-lain Lainnya		
17	Penyisihan Piutang Lainnya		
18	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>		
19	<b>Persediaan</b>	657.000,00	275.000,00
20	<b>JUMLAH ASET LANCAR (3+10+15+18+19)</b>	<b>657.000,00</b>	<b>275.000,00</b>
21			
22	<b>ASET TETAP</b>		
23	Tanah	-	-
24	Peralatan dan Mesin	3.366.090.619,75	2.940.644.619,75
25	Gedung dan Bangunan	-	-
26	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
27	Aset Tetap Lainnya	940.000,00	940.000,00
28	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-
29	Akumulasi Penyusutan	(2.419.994.242,35)	(2.097.563.593,35)
30	<b>JUMLAH ASET TETAP (23 sd 29)</b>	<b>947.036.377,40</b>	<b>844.021.026,40</b>
31			
32	<b>ASET LAINNYA</b>		
33	<b>Tagihan Jangka Panjang</b>		
34	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-
35	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>		
36	Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III		
37	<b>Aset Tidak Berwujud</b>		
38	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		
39	<b>Aset Lain-lain</b>	-	-
40	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
41	<b>JUMLAH ASET LAINNYA (33 sd 40)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42			
43	<b>JUMLAH ASET (20+30+39)</b>	<b>947.693.377,40</b>	<b>844.296.026,40</b>

44			
45	<b>KEWAJIBAN</b>		
46	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
47	<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>		
48	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>		
49	<b>Utang Belanja</b>	4.602.116,00	11.108.706,00
50	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>		
51	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (50 sd 53)</b>		
52			
53	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (49)</b>	<b>4.602.116,00</b>	<b>11.108.706,00</b>
54	<b>EKUITAS</b>		
55	EKUITAS	943.091.261,40	833.187.320,40
56			
57	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>943.091.261,40</b>	<b>833.187.320,40</b>
58	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (51+55)</b>	<b>947.693.377,40</b>	<b>844.296.026,40</b>

Praya, 31 Desember 2021  
Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Inspektur

Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd  
NIP. 19670521 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4                      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
Bidang Pemerintahan : 4 . 02                      Pengawasan  
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01                      Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01                      Inspektorat

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	0,00	28.784.586,34	28.784.586,34
1 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	0,00	28.784.586,34	28.784.586,34
1 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	28.784.586,34	28.784.586,34
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	12.787.035.257,00	12.656.594.248,00	(130.441.009,00)
2 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	8.986.425.012,00	8.965.927.351,00	(20.497.661,00)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.986.425.012,00	8.965.927.351,00	(20.497.661,00)
2 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.800.610.245,00	3.690.666.897,00	(109.943.348,00)
2 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.368.216.095,00	3.265.220.897,00	(102.995.198,00)
2 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	432.394.150,00	425.446.000,00	(6.948.150,00)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(12.787.035.257,00)	(12.685.378.834,34)	101.656.422,66
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(12.787.035.257,00)	(12.627.809.661,66)	159.225.595,34

Praya, 31 Desember 2021  
Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah

Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd

NIP. 196705211992031011



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

*periode 1 January s.d 31 December 2021*

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
<b>Unit Organisasi</b>	: 4.02 . 4.02.01	Inspektorat
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 4.02 . 4.02.01 . 01	Inspektorat

  

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	0,00	0,00	28.784.586,34	28.784.586,34	28.784.586,34
4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	0,00	0,00	28.784.586,34	28.784.586,34	28.784.586,34
4 . 1 . 4	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	0,00	0,00	28.784.586,34	28.784.586,34	28.784.586,34
4 . 1 . 4 . 27	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	26.724.683,34	26.724.683,34	26.724.683,34
4 . 1 . 4 . 27 . 01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	26.724.683,34	26.724.683,34	26.724.683,34
4 . 1 . 4 . 30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	2.059.903,00	2.059.903,00	2.059.903,00
4 . 1 . 4 . 30 . 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	2.059.903,00	2.059.903,00	2.059.903,00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	12.787.035.257,00	0,00	12.656.594.248,00	12.656.594.248,00	(130.441.009,00)
5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	8.986.425.012,00	0,00	8.965.927.351,00	8.965.927.351,00	(20.497.661,00)
5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.986.425.012,00	0,00	8.965.927.351,00	8.965.927.351,00	(20.497.661,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.867.197.401,00	0,00	3.903.724.660,00	3.903.724.660,00	36.527.259,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Belanja Gaji Pokok PNS	3.867.197.401,00	0,00	3.903.724.660,00	3.903.724.660,00	36.527.259,00
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	384.392.973,00	0,00	389.039.403,00	389.039.403,00	4.646.430,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	384.392.973,00	0,00	389.039.403,00	389.039.403,00	4.646.430,00
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	92.224.800,00	0,00	98.055.000,00	98.055.000,00	5.830.200,00
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	92.224.800,00	0,00	98.055.000,00	98.055.000,00	5.830.200,00
5 . 1 . 1 . 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	602.726.000,00	0,00	610.485.000,00	610.485.000,00	7.759.000,00
5 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	602.726.000,00	0,00	610.485.000,00	610.485.000,00	7.759.000,00
5 . 1 . 1 . 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.840.800,00	0,00	26.910.000,00	26.910.000,00	69.200,00
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.840.800,00	0,00	26.910.000,00	26.910.000,00	69.200,00
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	226.382.023,00	0,00	228.340.260,00	228.340.260,00	1.958.237,00
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Belanja Tunjangan Beras PNS	226.382.023,00	0,00	228.340.260,00	228.340.260,00	1.958.237,00
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.745.633,00	0,00	22.066.790,00	22.066.790,00	321.157,00
5 . 1 . 1 . 07 . 01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.745.633,00	0,00	22.066.790,00	22.066.790,00	321.157,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	58.491,00	0,00	58.441,00	58.441,00	(50,00)
5.1.1.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.491,00	0,00	58.441,00	58.441,00	(50,00)
5.1.1.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.755.154.891,00	0,00	3.677.545.797,00	3.677.545.797,00	(77.609.094,00)
5.1.1.13.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.755.154.891,00	0,00	3.677.545.797,00	3.677.545.797,00	(77.609.094,00)
5.1.1.24	Belanja Honorarium	9.702.000,00	0,00	9.702.000,00	9.702.000,00	0,00
5.1.1.24.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.702.000,00	0,00	9.702.000,00	9.702.000,00	0,00
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.800.610.245,00	0,00	3.690.666.897,00	3.690.666.897,00	(109.943.348,00)
5.2.1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.368.216.095,00	0,00	3.265.220.897,00	3.265.220.897,00	(102.995.198,00)
5.2.1.01	Belanja Barang Pakai Habis	721.508.095,00	0,00	718.316.000,00	718.316.000,00	(3.192.095,00)
5.2.1.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.876.000,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	(2.226.000,00)
5.2.1.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	251.298.450,00	0,00	251.298.450,00	251.298.450,00	0,00
5.2.1.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	132.745.325,00	0,00	132.595.550,00	132.595.550,00	(149.775,00)
5.2.1.01.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
5.2.1.01.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	46.000.000,00	0,00	45.400.000,00	45.400.000,00	(600.000,00)
5.2.1.01.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	18.431.200,00	0,00	18.278.000,00	18.278.000,00	(153.200,00)
5.2.1.01.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	237.120,00	0,00	224.000,00	224.000,00	(13.120,00)
5.2.1.01.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	8.410.000,00	0,00	8.410.000,00	8.410.000,00	0,00
5.2.1.01.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	248.310.000,00	0,00	248.260.000,00	248.260.000,00	(50.000,00)
5.2.1.04	Belanja Jasa Kantor	288.220.000,00	0,00	261.775.976,00	261.775.976,00	(26.444.024,00)
5.2.1.04.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	57.890.000,00	0,00	57.790.000,00	57.790.000,00	(100.000,00)
5.2.1.04.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	172.900.000,00	0,00	170.730.000,00	170.730.000,00	(2.170.000,00)
5.2.1.04.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
5.2.1.04.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.480.000,00	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00	(10.000,00)
5.2.1.04.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.000.000,00	0,00	4.327.878,00	4.327.878,00	(3.672.122,00)
5.2.1.04.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	27.950.000,00	0,00	7.458.098,00	7.458.098,00	(20.491.902,00)
5.2.1.07	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.1.07.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.1.15	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	196.920.000,00	0,00	142.168.000,00	142.168.000,00	(54.752.000,00)
5.2.1.15.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	166.920.000,00	0,00	112.168.000,00	112.168.000,00	(54.752.000,00)
5.2.1.15.02	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.1.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.500.000,00	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00
5.2.1.19.35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 19 . 36	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.110.068.000,00	0,00	2.091.460.921,00	2.091.460.921,00	(18.607.079,00)
5 . 2 . 1 . 23 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.268.000,00	0,00	62.390.921,00	62.390.921,00	(14.877.079,00)
5 . 2 . 1 . 23 . 03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.032.800.000,00	0,00	2.029.070.000,00	2.029.070.000,00	(3.730.000,00)
5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	432.394.150,00	0,00	425.446.000,00	425.446.000,00	(6.948.150,00)
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Alat Kantor	56.150.000,00	0,00	56.050.000,00	56.050.000,00	(100.000,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	56.150.000,00	0,00	56.050.000,00	56.050.000,00	(100.000,00)
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	259.994.150,00	0,00	259.698.000,00	259.698.000,00	(296.150,00)
5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja Modal Mebel	101.224.150,00	0,00	100.968.000,00	100.968.000,00	(256.150,00)
5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	158.770.000,00	0,00	158.730.000,00	158.730.000,00	(40.000,00)
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Alat Studio	13.550.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	(50.000,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	13.550.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	(50.000,00)
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Komputer Unit	30.000.000,00	0,00	28.850.000,00	28.850.000,00	(1.150.000,00)
5 . 2 . 3 . 31 . 03	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	30.000.000,00	0,00	28.850.000,00	28.850.000,00	(1.150.000,00)
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan Komputer	72.700.000,00	0,00	67.348.000,00	67.348.000,00	(5.352.000,00)
5 . 2 . 3 . 32 . 04	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	70.500.000,00	0,00	65.148.000,00	65.148.000,00	(5.352.000,00)
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	(12.787.035.257,00)	0,00	(12.627.809.661,66)	(12.627.809.661,66)	159.225.595,34
	<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	(12.787.035.257,00)	0,00	(12.627.809.661,66)	(12.627.809.661,66)	159.225.595,34